



PENGUATAN TATA KELOLA DESA DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI GAMPONG LAMTEUBA KABUPATEN ACEH BESAR

STRENGTHENING VILLAGE GOVERNANCE TO SUPPORT COMMUNITY FOOD SECURITY IN GAMPONG LAMTEUBA ACEH BESAR REGENCY

Novi Mailidarni^{1*}, Sulaiman¹, Nyak Yusfa Afrina¹, Tasliati Djafar¹, Syafei Ibrahim², Badruzzaman²

¹Agroteknologi Universitas Iskandar Muda-Banda Aceh

²Magister Administrasi Publik Universitas Iskandar Muda-Banda Aceh

*Email Koresponden: novimailidarni.unida@gmail.com

Abstract

Village food security is a crucial pillar of sustainable rural development, particularly in remote areas with abundant natural resources that have not been optimally managed. Gampong Lamteuba, Aceh Besar Regency, is a rural village characterised by fertile agricultural land and a community largely dependent on staple crop farming for their livelihood. However, one of the main challenges lies in the limited capacity of village governance to coordinate local potential in supporting sustainable food security. This Community Service Program (PKM) aims to strengthen village governance through a participatory approach to enhance community food security. The methods employed include socialisation activities, focus group discussions (FGDs), training sessions, and mentoring for village officials and farmer groups. The results indicate an increased understanding among village authorities and community members regarding the importance of governance in food security, improved coordination between village government and farmer groups, and the formulation of village-level policy recommendations to support local food management. This program contributes to strengthening village governance and community participation in achieving locally based food security.

Keywords: *Village Governance, Food Security, Community Empowerment, Rural Village, Public Administration*

Abstrak

Ketahanan pangan desa merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah pedalaman yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai namun belum dikelola secara optimal. Gampong Lamteuba Kabupaten Aceh Besar merupakan desa dengan kondisi lahan pertanian yang subur dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sembako. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya tata kelola desa dalam mengoordinasikan potensi tersebut untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola desa melalui pendekatan partisipatif dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan, dan pendampingan kepada perangkat desa serta kelompok tani. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai peran tata kelola desa dalam ketahanan pangan, meningkatnya koordinasi antara pemerintah desa dan kelompok tani, serta tersusunnya rekomendasi kebijakan desa yang mendukung



pengelolaan pangan lokal. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Kata Kunci: Tata Kelola Desa, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pedalaman, Administrasi Publik

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pedesaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi lahan subur namun masih menghadapi kelemahan tata kelola desa dalam memaksimalkan ketersediaan pangan lokal serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan di desa tidak hanya soal produksi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif dan terkoordinasi (Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 2025). Dalam pembangunan nasional dan daerah, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi pangan, tetapi juga mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, ketahanan pangan menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2020).

Dalam konteks desa seperti *Gampong Lamteuba*, ketahanan pangan menjadi aspek penting bagi keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk di bidang pangan. Penguatan tata kelola desa menjadi prasyarat penting agar kebijakan ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Grindle, 2022). Tata kelola desa yang lemah berpotensi menyebabkan ketidakefisienan pengelolaan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Peran pemerintah desa sangat strategis dalam menjamin ketersediaan pangan melalui kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pengaturan alokasi sumber daya yang proporsional (Safitri, 2023). Di tingkat desa, sinergi antara perangkat desa dan kelompok tani diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan. Selain itu, penerapan model tata kelola yang baik dan mekanisme partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program ketahanan pangan (Sari *et al.*, 2023). Prinsip-prinsip tata kelola ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pemerintah desa.



Gampong Lamteuba Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu desa pedalaman yang memiliki potensi lahan pertanian yang subur dan mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian sembako. Komoditas pangan seperti padi, sayuran, dan tanaman pangan lainnya menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekaligus penopang ekonomi lokal. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal karena masih terbatasnya kapasitas tata kelola desa dalam mengintegrasikan program pertanian dengan perencanaan pembangunan desa secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan di desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa (Kurniawan & Setiawan, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola desa yang baik (*good village governance*) ditandai oleh adanya prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam pengelolaan program ketahanan pangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal (Ansell & Gash, 2021). Tanpa adanya tata kelola yang kuat, program ketahanan pangan berisiko menjadi kegiatan yang bersifat sektoral, jangka pendek, dan kurang berkelanjutan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa penguatan tata kelola desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Penelitian Safitri (2023), menegaskan bahwa peran aktif pemerintah desa dalam mengoordinasikan kelompok tani, mengelola anggaran desa, serta menyediakan ruang partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas program pangan lokal. Hal serupa juga disampaikan oleh Sari *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa ketahanan pangan desa akan lebih berkelanjutan apabila didukung oleh kelembagaan desa yang kuat dan kebijakan yang partisipatif.

Selain itu, kebijakan nasional dalam lima tahun terakhir juga menempatkan desa sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Pemerintah mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program pangan lokal, penguatan kelompok tani, serta pengembangan kelembagaan ekonomi desa. Pendekatan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa (Wantannas RI, 2024). Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kapasitas aparatur desa dan rendahnya koordinasi lintas aktor.

Di Gampong Lamteuba, tantangan tata kelola desa dalam mendukung ketahanan pangan antara lain ditunjukkan oleh belum optimalnya perencanaan program pangan desa, lemahnya integrasi antara kelompok tani dengan pemerintah desa, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai peran tata kelola dalam pembangunan pangan. Program pertanian masih dijalankan secara individual dan belum terorganisasi dalam suatu sistem pengelolaan yang terstruktur. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi produksi dan belum maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap ketahanan pangan desa secara kolektif.



Penguatan tata kelola desa menjadi penting untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui pendekatan partisipatif, pemerintah desa dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan pangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola isu publik yang kompleks, termasuk ketahanan pangan (Emerson *et al.*, 2021). Dengan kolaborasi yang baik, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan dan keberlanjutan program dapat lebih terjamin.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang sebagai upaya akademik untuk memperkuat tata kelola desa dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di Gampong Lamteuba Kabupaten Aceh Besar. PKM ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis masyarakat, tetapi lebih menekankan pada penguatan aspek tata kelola dan administrasi publik di tingkat desa. Melalui sosialisasi, diskusi kelompok terarah, pelatihan dan pendampingan, diharapkan tercipta pemahaman bersama antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai pentingnya tata kelola desa yang baik dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Dengan demikian, PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Gampong Lamteuba, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model tata kelola desa yang responsif terhadap isu ketahanan pangan di wilayah pedesaan.

Melalui PKM ini, diperkuat pula kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan desa serta kebutuhan untuk menata ulang tata kelola desa sehingga lebih adaptif dan inklusif. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi lahan subur demi pencapaian ketahanan pangan berbasis lokal dan berkelanjutan (Wantannas RI, 2024). Hal ini relevan dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional yang mulai menekankan peran serta desa melalui penggunaan Dana Desa dan kolaborasi multi-pihak untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan pada hari Sabtu, 6 September 2025 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola desa dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di Gampong Lamteuba Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam kondisi tata kelola desa, pola interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pangan lokal.

Lokasi dan Waktu Kegiatan

PKM dilaksanakan di Gampong Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan desa pedalaman dengan potensi lahan pertanian yang subur dan mayoritas masyarakat bermata



pencaharian sebagai petani sembako. Kegiatan dilaksanakan selama satu periode pelaksanaan PKM yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Subjek dan Sasaran Kegiatan

Subjek PKM meliputi perangkat desa, kelompok tani, dan masyarakat petani di Gampong Lamteuba. Sasaran utama kegiatan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip tata kelola desa yang baik (*good governance*) dalam mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi lapangan, untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi tata kelola desa, aktivitas pertanian masyarakat, serta pola koordinasi antara pemerintah desa dan kelompok tani.
2. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada perangkat desa dan perwakilan kelompok tani guna menggali informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan kendala program ketahanan pangan desa.
3. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD), bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, potensi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan desa terkait ketahanan pangan.
4. Dokumentasi, berupa data perencanaan desa, notulen kegiatan, dan dokumentasi pelaksanaan PKM sebagai pendukung analisis.

Tahapan Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan, meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, pemetaan awal kondisi ketahanan pangan, serta penyusunan materi sosialisasi.
2. Tahap Pelaksanaan, berupa sosialisasi konsep tata kelola desa dan ketahanan pangan, pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan, serta FGD antara pemerintah desa dan masyarakat.
3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi, dilakukan untuk menilai perubahan pemahaman dan koordinasi antar pihak, serta menyusun rekomendasi kebijakan desa yang mendukung ketahanan pangan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan desa. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan dampak kegiatan PKM terhadap penguatan tata kelola desa dan ketahanan pangan masyarakat (Sugiyono, 2022).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Tata Kelola Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat menunjukkan bahwa Gampong Lamteuba memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Lahan pertanian yang subur dan pengalaman masyarakat dalam budidaya tanaman sembako menjadi modal utama desa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola melalui sistem tata kelola desa yang terencana dan terkoordinasi dengan baik.

Sebelum pelaksanaan PKM, pengelolaan kegiatan pertanian di Gampong Lamteuba cenderung bersifat individual dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. Program ketahanan pangan belum menjadi prioritas utama dalam dokumen perencanaan desa, sehingga dukungan kebijakan dan anggaran masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama ketahanan pangan desa bukan semata-mata pada aspek produksi, melainkan pada lemahnya tata kelola desa dalam mengoordinasikan sumber daya dan aktor yang terlibat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa ketahanan pangan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan yang partisipatif (Grindle, 2022).

2. Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai konsep ketahanan pangan dan peran tata kelola desa. Aparatur desa mulai memahami bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan hasil pertanian, tetapi juga mencakup pengelolaan kebijakan, penganggaran, serta koordinasi lintas aktor di tingkat desa.

Masyarakat petani juga menunjukkan respons positif terhadap materi yang disampaikan, terutama terkait pentingnya perencanaan bersama dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan desa. Hasil diskusi memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta menyadari perlunya mekanisme partisipatif agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak bersifat sementara.

Peningkatan pemahaman ini mendukung temuan Ansell & Gash (2021), yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam tata kelola kolaboratif, terutama dalam pengelolaan isu publik yang kompleks seperti ketahanan pangan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Kondisi ini sejalan dengan pandangan OECD (2021), yang menegaskan bahwa transparansi dalam tata kelola publik berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Namun demikian, transparansi yang diterapkan masih bersifat awal dan

memerlukan penguatan melalui sistem administrasi yang berkelanjutan agar tidak hanya bergantung pada komunikasi lisan semata.



Gambar 1. Foto Bersama Perangkat Aparatur Gampong Lamteuba

3. Penguatan Koordinasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Tani

Salah satu hasil penting dari kegiatan PKM ini adalah meningkatnya koordinasi antara pemerintah desa dan kelompok tani. Melalui FGD, pemerintah desa dan kelompok tani dapat duduk bersama untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi, serta kebutuhan yang berkaitan dengan ketahanan pangan desa. Proses ini membuka ruang komunikasi yang sebelumnya belum berjalan secara optimal.

Kelompok tani mulai dipandang sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, bukan sekadar pelaksana kegiatan pertanian. Pemerintah desa juga menunjukkan komitmen untuk melibatkan kelompok tani dalam penyusunan rencana kerja desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pangan lokal.

Penguatan koordinasi ini mencerminkan penerapan prinsip tata kelola desa yang baik, khususnya prinsip kolaborasi dan partisipasi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam membangun sinergi dengan kelompok masyarakat (Sari *et al.*, 2023).

4. Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan Desa

Hasil diskusi dan pendampingan menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan desa yang relevan dengan upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain perlunya integrasi program ketahanan pangan ke dalam dokumen perencanaan desa,



penguatan kelembagaan kelompok tani, serta alokasi anggaran desa yang lebih berpihak pada pengembangan pangan lokal.

Perumusan rekomendasi kebijakan ini menjadi indikator awal meningkatnya kapasitas tata kelola desa dalam merespons isu ketahanan pangan. Pemerintah desa mulai menyadari pentingnya kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Temuan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong desa untuk mengambil peran lebih besar dalam ketahanan pangan melalui pemanfaatan Dana Desa dan penguatan kelembagaan lokal (Wantannas RI, 2024). Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat desa.

5. Implikasi Administrasi Publik dalam Penguatan Ketahanan Pangan Desa

Dari perspektif administrasi publik, hasil PKM ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan isu lintas sektor yang memerlukan pendekatan tata kelola yang integratif. Penguatan tata kelola desa tidak hanya meningkatkan efektivitas program pangan, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ketahanan pangan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat menjadi lebih terbuka untuk terlibat dalam proses pembangunan desa karena merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi secara nyata.

Hal ini menguatkan pandangan bahwa tata kelola desa yang baik merupakan fondasi penting dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, termasuk dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat (OECD, 2020). Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Gampong Lamteuba, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian administrasi publik di tingkat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema: “Penguatan Tata Kelola Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat di Gampong Lamteuba Kabupaten Aceh Besar” menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan aparatur desa, kelompok tani, dan masyarakat, terjadi peningkatan pemahaman mengenai perencanaan desa berbasis potensi lokal serta pentingnya pengelolaan sumber daya pertanian secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Gampong Lamteuba memiliki potensi lahan yang subur dan sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung kemandirian pangan, khususnya pada komoditas sembako. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan program pangan desa, disertai peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengembangan kegiatan pertanian yang lebih terarah. Selain



itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa memberikan dampak positif terhadap kesadaran kolektif akan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi kesejahteraan desa.

Secara keseluruhan, penguatan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berbasis potensi lokal terbukti mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah pedesaan terpencil seperti Gampong Lamteuba.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan program ketahanan pangan secara berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan RKPDes, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan potensi pertanian lokal.
2. Kelompok tani dan masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan inovasi budidaya dan pengelolaan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan produksi pangan.
3. Pendampingan lanjutan dari perguruan tinggi atau instansi terkait sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia desa, khususnya dalam aspek manajemen, teknologi pertanian, dan tata kelola kelembagaan.
4. Penelitian dan pengabdian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang penguatan tata kelola desa terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif.

Dengan implementasi saran tersebut, diharapkan ketahanan pangan di *Gampong Lamteuba* dapat terus meningkat dan menjadi model pengembangan desa berbasis tata kelola yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R., Nugroho, I., & Suryanto, T. (2021). Village governance and community participation in strengthening local food security. *Journal of Rural Development*, 38(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/jrd.2021.38.2.145>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik ketahanan pangan Indonesia 2023*. BPS Republik Indonesia.
- FAO. (2021). *Building resilient food systems in rural areas*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Pedoman penguatan ketahanan pangan desa*. Kemendes PDTT Republik Indonesia.
- Kurniawan, B., & Pratama, A. (2020). Strengthening village institutions to support sustainable agriculture. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 17(1), 55–67. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.304567>



- Mulyani, A., & Sarwani, M. (2021). Agricultural land potential and food security in rural Indonesia. *Indonesian Journal of Agricultural Science*, 22(2), 89–98. <https://doi.org/10.21082/ijas.v22n2.2021.89-98>
- Mailidarni, N., Aprita, I. R., Yanti, F., & Rejeki, S. U. P. (2022). Teknologi pengolahan tepung daun kelor sebagai substitusi bahan pewarna alami terhadap olahan pangan. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 5–8. <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v1i1.89>
- Mailidarni, N., Jauhari, dan Juliawati. (2024). Pemanfaatan ekoenzim dalam meminimalisir penggunaan produk kimia serta hasil analisis terhadap produk yang dihasilkan. *Wisdom: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://jurnal.rocewisdomaceh.com/index.php/wisdom/article/view/6>
- Mailidarni, N., Badruzzaman, B., Zamzami, Z., Sulaiman, S., Djafar, T., Juliawati, J., & Puryani, I. (2026). Optimizing the potential of Krueng Raya River for strengthening local economic development and environmental resilience. *WISDOM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom*, 3(1). <https://doi.org/10.71275/wisdom.v3i1.157>
- Mailidarni, N., Sulaiman, S., Juliawati, J., Jauhari, J., Djafar, T., & Syarifuddin, S. (2025). Optimization of limited home yard space and utilization of household organic waste into ecoenzyme to reduce chemical dependency in the household environment. *WISDOM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom*, 2(2). <https://doi.org/10.71275/wisdom.v2i2.104>
- OECD. (2020). *Rural well-being: Geography of opportunities*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d25cef80-en>
- Rahmawati, D., Hadi, S., & Lestari, E. (2023). Participatory rural development and food security enhancement. *Journal of Community Empowerment*, 8(1), 23–34.
- Sari, N., & Widodo, S. (2022). Village-based food security programs and local resource management. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 101–110.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi revisi). Alfabeta.
- World Bank. (2021). *Transforming food systems for food security and resilience*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1605-5>